



Judul : Negeri Hoax
Tanggal : Kamis, 04 Oktober 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 16

Negeri Hoax

Negeri ini belum beranjak keluar dari kungkungan berita palsu atau *hoax*. Di tengah suasana duka mendalam karena gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan empat kabupaten di Sulawesi Tengah, *hoax* menyebar liar.

Berita palsu mengenai ancaman gempa lebih hebat atau tsunami lebih dahsyat menyebar melalui media sosial. Hal serupa juga terjadi ketika sebagian besar warga Lombok diterjang gempa Agustus lalu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapat tugas tambahan mengimbau agar korban gempa maupun masyarakat luas tidak panik, selalu waspada dan tidak percaya dengan berita bohong yang beredar.

Jelas bahwa *hoax* tidak hanya berkaitan dengan pencemaran nama baik dan kredibilitas satu atau kelompok orang melainkan bisa menjadi sumber keresahan massal. Sudah terbukti di sejumlah negara, berita palsu yang menyebar melalui media sosial bisa menggerakkan massa dengan amarah sehingga berujung pada pembunuhan.

Di dalam situasi dengan kerawanan tertentu seperti saat ini, pasca-bencana Lombok dan Sulteng berbarengan dengan dimulainya kampanye pemilu, sangat mungkin ada pihak-pihak yang menginginkan kondisi negara tidak kondusif. Untuk itu sebelum mengimbau masyarakat waspada, para elite bangsa sebagai panutan sebaiknya sudah beres dengan dirinya sendiri berkaitan dengan berita bohong ini.

Fenomena kebohongan mantan pemain teater sekaligus anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ratna Sarumpaet menjadi pelajaran berharga soal kewaspadaan ganda. Kita bukan hanya wajib mewaspada *hoax* yang beredar melainkan juga mewaspada jangan-jangan diri atau kelompok sendiri sebagai biang kabar bohong.

Ratna mengaku dianiaya orang tak dikenal. Kabar ini, entah benar atau bohong, tidak akan menimbulkan kegaduhan dan perhatian masyarakat bila tidak secara sengaja dilembungkan dan disebarluaskan menjadi sebuah isu bernuansa politik.

Pemikiran kritis atas info penganiayaan ini sudah riuh di dunia maya. Warganet mengunggah banyak pertanyaan kritis terkait kabar penganiayaan sebagai bagian filter apakah kabar tersebut benar atau sebaliknya. Pemikiran kritis ini tampaknya dikesampingkan oleh para elite partai koalisi Prabowo-Sandi sehingga mereka terjebak dalam kebohongan Ratna.

Hoax bakal terus tumbuh subur di komunitas yang memang belum dewasa menyaring berita. *Hoax* akan terus mengungkit masyarakat yang tidak toleran, tidak punya pemikiran terbuka, dan mereka yang hanya mengenakan kacamata kuda kepentingan politik, agama, suku, dan kelompoknya sendiri. Sebaliknya, kabar bohong tidak akan mengelana di komunitas yang kritis memilih dan memilah informasi, toleran terhadap perbedaan, serta terbuka pada berbagai kemungkinan dan kepentingan pihak lain.

Ratna sudah meminta maaf. Tindak lanjut dari kasus ini sudah disebutkan oleh cawapres Sandiaga Uno. Ratna bakal dilaporkan ke polisi. Ratna juga dipecat dari tim pemenangan nasional Prabowo-Sandi.

Pelajaran berharga lain adalah kecepatan aparat kepolisian dalam mencari fakta kebenaran terkait kabar penganiayaan. Meski belum ada pelapor, aparat Polda Metro Jaya jemput bola menyelidiki. Demikianlah seharusnya. Aparat peka dan tanggap dengan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan atau kegaduhan.

Tanpa reaksi cepat aparat menelisik kabar penganiayaan, kebohongan Ratna bukan tidak mungkin menjadi bola salju yang menggelinding menerjang lawan-lawan politiknya. Lebih parah lagi, kredibilitas institusi Polri bakal tergerus mengingat kabar bohong itu secara tidak langsung sudah mengajak masyarakat tidak percaya pada aparat hukum yang sah yakni Polri.

Salah satu petinggi partai sekaligus anggota DPR yang terhanyut kebohongan menyebutkan bahwa Ratna tidak melapor ke polisi karena takut intimidasi dan tak yakin polisi menindaklanjuti.

Ke depan, Polri harus bisa membuktikan bahwa ia bekerja bukan sebagai penjaga kepentingan politik tertentu atau sekadar menjaga muwajah institusi. Ia adalah penegak hukum untuk seluruh rakyat. Sebab itu, kesigapan Polri mengelola permasalahan yang muncul di masyarakat tidak boleh berhenti hanya pada kasus yang menyangkut orang-orang besar. Kesigapan dalam menangani kasus penganiayaan Ratna juga harus sama diterapkan pada kasus lainnya.

Dalam hal penegakan hukum pun demikian. Salah satu harapan yang bertebaran di media sosial terkait isu kebohongan Ratna adalah agar semua penyebar *hoax* tanpa kecuali dikenai sanksi setimpal. Jangan hanya rakyat kecil ditangkapi atas tuduhan penyebar kebencian atau berita palsu sementara para elite, entah wakil rakyat atau pejabat partai, seenak perutnya menebar kabar bohong.